

Komunikasi Aktor Politik Anggaran Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Communication of Political Actors Government Budget Regional People's Representative Council of North Sumatra Province

Ara Auza, Muhammad Zahrawi, Ilma Saakinah Tamsil

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

Email: ara@stafg.uma.ac.id

ABSTRACT

This study is titled “Communication of Budget Political Actors in the Regional House of Representatives of North Sumatra Province.” The research employs a descriptive qualitative method to explore and understand the dynamics of communication among political actors in the budget-setting process in North Sumatra Province. The data collection techniques used include interviews, participatory observation, and documentation. The collected data were analyzed through data condensation, data presentation, conclusion drawing, and triangulation. The results of the study indicate that the communication of budget political actors in the budget political process includes three main types of communication: (1) Political Organization Communication, (2) Task-Oriented Communication, and (3) Interpersonal Communication. The study also identifies that the main budget political actor in the infrastructure policy program is the Governor of North Sumatra. The technical aspects of this process are supported by three Secretaries of the Region, the Head of Bappelitbangda, the Head of BPKAD, the Head of the Public Works Department, as well as the leadership of the DPRD, the leadership of the factions, and the leadership of Commission D of the DPRD North Sumatra Province in the field of Development. This research provides in-depth insights into how communication among political actors influences the budget-setting process and resource allocation in North Sumatra Province. These findings are expected to serve as a basis for improving communication processes and decision-making in future budget policies.

Keywords: Communication, Political Actor, Political Budgeting

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Komunikasi Aktor Politik Anggaran Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika komunikasi antara aktor-aktor politik dalam proses penetapan anggaran di Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi partisipatoris, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi aktor politik anggaran dalam proses politik

anggaran meliputi tiga jenis komunikasi utama: (1) komunikasi organisasi politik, (2) komunikasi berorientasi tugas, dan (3) komunikasi antar-pribadi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa aktor politik anggaran utama dalam program kebijakan bidang infrastruktur adalah Gubernur Sumatera Utara. Aspek teknis dari proses ini didukung oleh tiga orang Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara bidang Pembangunan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana komunikasi antara aktor-aktor politik mempengaruhi proses penetapan anggaran dan alokasi sumber daya di Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan proses komunikasi dan pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran di masa depan.

Kata Kunci: Aktor Politik, Komunikasi, Politik Anggaran

Pendahuluan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 (PEMPROVSU, 2021). Perubahan tersebut meliputi 8 (delapan) prioritas pembangunan di Sumatera Utara, yaitu: (1) peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja; (2) peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan; (3) pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; (4) penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; (5) peningkatan daya saing melalui sektor agraris; (6) peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata; (7) peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga; (8) peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PEMPROVSU, 2021).

Menurut Ja'far (Ja'far, 2007), infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada jangka pendek menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi dan pada jangka menengah dan jangka panjang mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, seperti dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal,

berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja (Chrestella Julitawati Hutaauruk, 2019).

Peningkatan kualitas infrastruktur di Sumatera Utara sejalan dengan sasaran pembangunan Nasional terutama dalam hal konektivitas jalan. Konektivitas jalan memiliki fungsi vital dalam menghubungkan berbagai pusat kegiatan, seperti pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, dengan daerah-daerah produksi yang tersebar di seluruh wilayah. Pembangunan dan penambahan ruas jalan yang efektif akan mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke berbagai layanan penting. Konektivitas jalan yang baik juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, karena mempermudah arus perdagangan dan mobilitas tenaga kerja. Dengan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, daerah-daerah terpencil dapat lebih mudah terhubung dengan pasar yang lebih luas, sehingga membuka peluang bagi pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kendala Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan program tersebut salah satunya adalah politik anggaran yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Proses politik anggaran ini menunjukkan dinamika yang kompleks, termasuk dalam penentuan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran, serta adanya kepentingan politik dari berbagai pihak dalam mendapatkan bagian alokasi anggaran infrastruktur.

Fenomena pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif ini dinamakan Wildavsky dan Caiden sebagai politik anggaran, dalam proses penganggaran seringkali diwujudkan dalam berbagai cara yang lebih menekankan kepada dimensi politik, di mana anggaran kemudian didistribusikan dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan pembangunan (Setiawan, 2015). Politik anggaran digunakan untuk dapat melihat proses politik anggaran yang terjadi dalam pembahasan kebijakan anggaran yang melibatkan interaksi aktor-aktor baik eksekutif maupun legislatif dalam proses perumusan kebijakan anggaran. Charles Lindblom menjelaskan dalam memahami proses perumusan kebijakan, perlu dipahami aktor-aktor yang terlibat baik yang resmi ataupun yang tidak resmi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2012).

Aktor politik memainkan peran sentral dalam proses politik anggaran, khususnya program penganggaran infrastruktur melalui program *multiyears* di dalam RPJMD. Mulai dari merancang dan mengusulkan program, evaluasi, negosiasi sampai pengesahan anggaran. Proses politik anggaran ini meliputi pembahasan yang mendalam untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas daerah dan kepentingan politik yang beragam dengan tujuan akhir memastikan implementasi yang efektif dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Penanganan konflik kepentingan dan peningkatan koordinasi antara berbagai aktor terkait juga menjadi kunci dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dalam proses politik anggaran di Provinsi Sumatera Utara, komunikasi memainkan peran penting antara aktor politik, khususnya dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Komunikasi yang efektif antara pemerintah eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Kepentingan politik sering kali mempengaruhi alokasi anggaran, sehingga komunikasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Aktor politik harus mampu bernegosiasi dan menyepakati alokasi anggaran yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara, penting bagi aktor politik untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD. Komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif harus menjadi prioritas utama dalam proses politik anggaran. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau peristiwa dari perspektif partisipan (Sugiyono, 2018). Peneliti berusaha untuk menangkap makna, pengalaman, dan pandangan partisipan tentang topik yang diteliti. Peneliti tidak memulai dengan hipotesis yang ketat, tetapi lebih fokus pada eksplorasi dan pemahaman fenomena. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi partisipatoris dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data,

penarikan kesimpulan serta triangulasi data oleh Creswell yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif dengan menggabungkan berbagai metode, sumber data, atau perspektif (John W. Creswell, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses politik anggaran di bidang infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui beberapa tahap berurut, yaitu:

- a. MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan POKIR (Pokok Pikiran DPRD). Forum perencanaan yang melibatkan masyarakat dan pokok pikiran anggota dewan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah.
- b. RKPD. Kemudian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) menyusun rencana kerja tahunan pemerintah daerah berdasarkan hasil MUSRENBANG.
- c. KUA-PPAS. Tahap KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), kebijakan umum dan prioritas anggaran disusun.
- d. Rancangan Awal APBD (*Draft*). Penyusunan rancangan awal APBD dilakukan dalam tahap *draft*, yang kemudian dibahas di tingkat komisi, khususnya Komisi D yang membidangi pembangunan.
- e. Pembahasan Anggaran di Tingkat eksekutif dan legislatif. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) membahas dan menyelaraskan anggaran di tingkat eksekutif dan legislatif
- f. Rapat Paripurna dan Pandangan Akhir. Pembahasan dan persetujuan anggaran di tingkat dewan melalui rapat paripurna. Pandangan akhir mengenai kebijakan umum anggaran disampaikan dalam Pandangan KUA-PPAS, dan menunggu hingga pemerintah memberikan jawaban atas pandangan serta pertanyaan dari legislatif.
- g. Pembahasan Final. Pembahasan final dilakukan di Badan Anggaran (Banggar), dan penyusunan rancangan akhir anggaran dilakukan pada tahap finalisasi anggaran.
- h. Sinkronisasi dan Penetapan Anggaran. Sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dilakukan hingga pengesahan final oleh dewan yang terjadi dalam rapat paripurna, diikuti oleh penyusunan dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Dokumen APBD), dan akhirnya anggaran resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) dan dilaksanakan oleh Unit Kerja SKPD.

Sekretaris Daerah melakukan rapat-rapat teknis untuk merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memasukkan infrastruktur sebagai program prioritas. Ini dilakukan dengan berkomunikasi dengan unsur pimpinan di DPRD, termasuk Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi D yang membidangi pembangunan. Keluhan dari masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun program infrastruktur.

Teori kebijakan publik menekankan pentingnya partisipasi berbagai pihak, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan untuk mencapai *check and balance*. Sistem *check and balance* memiliki manfaat yang signifikan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kualitas keputusan. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, seperti proses birokrasi yang lebih lambat, potensi konflik antar lembaga, dan biaya operasional yang tinggi. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, komunikasi antara Sekretaris Daerah dengan pimpinan DPRD dan Komisi D menunjukkan adanya negosiasi dan kompromi politik dalam proses anggaran. Kepentingan berbagai aktor politik harus dikelola dengan baik untuk mencapai kesepakatan anggaran yang mengakomodasi prioritas pembangunan infrastruktur. Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, sering kali menghadapi tantangan dalam pembahasan anggaran karena anggotanya berasal dari berbagai fraksi partai dengan kepentingan konstituen yang berbeda-beda. Masing-masing fraksi, seperti Gerindra, PKB, dan lainnya, memiliki agenda dan prioritas yang didasarkan pada aspirasi konstituen mereka yang harus diperjuangkan dalam forum tersebut. Hal ini dapat menyebabkan dinamika yang kompleks, di mana setiap fraksi berusaha untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk proyek-proyek yang akan langsung menguntungkan daerah pemilihannya. Sementara tujuan utama adalah memperbaiki infrastruktur secara keseluruhan, kepentingan fraksional ini bisa menimbulkan perdebatan sengit dan negosiasi panjang untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak.

Dalam konteks politik anggaran di bidang infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terlibat berbagai aktor yang memainkan peran penting dalam proses pengambilan

keputusan. Aktor tersebut dikenal dengan sebutan *insider actor*, merujuk kepada aktor-aktor yang memiliki akses langsung dan pengaruh dalam proses pembuatan keputusan politik, terutama dalam konteks penganggaran dan kebijakan publik. Dalam politik anggaran, *insider actor* umumnya terbagi menjadi dua kelompok utama: eksekutif dan legislatif.

Teori politik anggaran membantu memahami dinamika interaksi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penetapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Mereka memiliki peran penting dalam menetapkan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan mengelola implementasi kebijakan sesuai dengan visi pemerintahan. Di sisi lain, anggota legislatif, khususnya DPRD dan komisi-komisi terkait, juga termasuk *insider actor* karena mereka memiliki kewenangan untuk menyetujui, mengubah, atau menolak anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Mereka mewakili suara masyarakat dalam proses pembahasan anggaran, memastikan bahwa alokasi dana publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi konstituen mereka. Aktor-aktor utama dalam proses ini meliputi:

- a. Pihak eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara serta didukung oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BAPPELITBANGDA, Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- b. Pihak legislatif yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Anggota Badan Anggaran, Pimpinan, serta anggota Komisi D bidang pembangunan.

SEKDA dan TAPD memegang peranan dalam merencanakan, menyusun, dan mengusulkan anggaran untuk program infrastruktur melalui berbagai rapat teknis di Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Anggaran. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati, serta menyelaraskan kebutuhan infrastruktur dengan ketersediaan dana yang ada. Di sisi lain, anggota DPRD, khususnya Komisi D, turut berperan dalam memastikan bahwa program-program infrastruktur ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penelitian menyoroti bahwa aktor dalam penyusunan APBD terbagi menjadi aktor formal dan aktor informal. Secara formal, Gubernur sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam pemerintahan daerah memainkan peran kunci dalam menentukan prioritas anggaran, termasuk untuk infrastruktur. Di sisi lain, aktor informal seperti relasi keluarga atau jaringan politik juga

dapat mempengaruhi proses keputusan, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam institusi formal.

Teori fungsionalisme struktural sebuah pendekatan yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat (Turama, 2020). Pandangan ini memungkinkan kita melihat setiap elemen dalam struktur pemerintahan sebagai entitas yang memiliki fungsi spesifik untuk mendukung keseluruhan sistem politik dan anggaran. Terdiri dari aktor-aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan di dalam sistem pemerintahan.

1. Peran Eksekutif dalam Fungsionalisme Struktural

Gubernur Sumatera Utara dan timnya, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BAPPELITBANGDA, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, memainkan peran vital dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Mereka berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan kebutuhan pembangunan daerah, terutama infrastruktur, terakomodasi secara efektif. Fungsi utama mereka adalah menyusun rencana yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran dengan tepat, sehingga sistem politik dan ekonomi daerah dapat berjalan dengan efisien.

2. Peran Legislatif dalam Fungsionalisme Struktural

Pimpinan DPRD, Anggota Badan Anggaran, dan Komisi D memiliki fungsi sebagai pengawas dan penyeimbang. Mereka bertugas memastikan bahwa alokasi anggaran yang diajukan oleh eksekutif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kepentingan publik. Dalam konteks teori fungsionalisme struktural, mereka menjalankan fungsi kontrol dan koreksi untuk memastikan bahwa sistem politik berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak terjadi penyimpangan yang bisa merugikan masyarakat. Interaksi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran mencerminkan fungsi koordinasi dan integrasi dalam teori fungsionalisme struktural. Proses negosiasi dan kompromi yang terjadi antara kedua pihak adalah upaya untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, serta memastikan bahwa

semua komponen sistem bekerja secara harmonis. Tanpa koordinasi yang efektif, fungsi sistem akan terganggu, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan disfungsi dalam implementasi program pembangunan.

3. Peran Aktor Informal dalam Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural juga memungkinkan kita untuk memahami peran aktor informal dalam proses politik anggaran. Meskipun mereka tidak terlibat secara resmi dalam struktur pemerintahan, mereka tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Jaringan politik atau relasi keluarga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan di luar struktur formal, yang dapat memperkuat atau, dalam beberapa kasus, mengganggu keseimbangan sistem. Namun, dalam konteks fungsionalisme, mereka tetap dilihat sebagai bagian dari struktur yang lebih besar yang memengaruhi dinamika politik dan penganggaran.

Secara keseluruhan, teori fungsionalisme struktural menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem politik dan penganggaran. Setiap aktor memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung stabilitas dan kesinambungan proses politik anggaran. Ketika semua elemen ini bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya, sistem politik dan anggaran daerah dapat beroperasi dengan efektif, sehingga pembangunan infrastruktur yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Melalui analisis ini, kita dapat melihat bahwa peran komunikasi antar-aktor dalam proses politik anggaran tidak hanya penting untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan fungsi sistem pemerintahan secara keseluruhan. Teori Fungsionalisme Struktural menjelaskan bahwa setiap elemen dalam struktur pemerintahan memiliki fungsi spesifik yang mendukung keseluruhan sistem, keberadaan Komunikasi yang efektif antara berbagai elemen dalam struktur tersebut sangat mendukung struktur pemerintahan seperti yang dijelaskan melalui teori Fungsionalisme Struktural serta memungkinkan tercapainya tujuan politik yang tetap berorientasi kepada masyarakat.

4. Komunikasi Organisasi Politik

Komunikasi organisasi politik dalam proses politik anggaran di Provinsi Sumatera Utara melibatkan aktor-aktor politik kunci dari pihak eksekutif dan legislatif. Di pihak eksekutif, Gubernur Sumatera Utara bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BAPPELITBANGDA,

Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum memegang peran strategis dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan, terutama untuk program infrastruktur. Komunikasi yang efektif di antara mereka menjadi kunci untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang diusulkan tidak hanya sesuai dengan prioritas pembangunan, tetapi juga realistis mengingat keterbatasan anggaran. Rapat-rapat teknis dan koordinasi internal dalam eksekutif memungkinkan mereka untuk merumuskan kebijakan yang kemudian diajukan ke pihak legislatif.

Di pihak legislatif, Pimpinan DPRD, Anggota Badan Anggaran, serta anggota Komisi D bidang pembangunan berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Komunikasi organisasi politik antara eksekutif dan legislatif berlangsung dalam berbagai forum resmi, seperti rapat-rapat badan anggaran dan sidang-sidang DPRD. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan negosiasi dan mencapai kompromi politik. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sekadar mengikuti kepentingan politik eksekutif. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain komunikasi formal, komunikasi informal juga memainkan peran penting dalam proses politik anggaran. Pertemuan-pertemuan tidak resmi antara anggota eksekutif dan legislatif, serta jaringan komunikasi politik yang melibatkan aktor-aktor kunci, dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses penganggaran. Komunikasi informal ini sering kali digunakan untuk membangun konsensus atau menyelesaikan konflik yang muncul dalam perumusan anggaran. Dengan demikian, keberhasilan proses politik anggaran sangat bergantung pada sejauh mana aktor-aktor politik ini dapat berkomunikasi secara efektif, baik secara formal maupun informal, untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

5. Komunikasi Berorientasi Tugas

Dalam proses politik anggaran, komunikasi berorientasi tugas sangat penting bagi aktor-aktor politik seperti eksekutif dan legislatif. Komunikasi berorientasi tugas berfokus pada penyelesaian pekerjaan, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penganggaran dilakukan dengan efisien dan efektif. Pihak eksekutif, yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera

Utara bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BAPPELITBANGDA, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, menggunakan komunikasi ini untuk mengkoordinasikan perencanaan, pengusulan, dan penyesuaian anggaran dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Komunikasi yang jelas dan terarah di antara mereka meminimalkan kesalahan dalam perencanaan anggaran serta memastikan bahwa setiap tugas terlaksana sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Pada sisi legislatif, komunikasi berorientasi tugas juga berperan dalam memastikan bahwa anggota DPRD, khususnya Komisi D bidang pembangunan, memahami dan mengevaluasi dengan cermat usulan anggaran dari eksekutif. Mereka harus memastikan bahwa komunikasi yang terjadi dalam rapat-rapat resmi efektif dalam mencapai pemahaman yang sama mengenai prioritas anggaran, serta mencegah miskomunikasi yang dapat menunda proses pengesahan anggaran. Dalam konteks ini, komunikasi berorientasi tugas bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan implementasi program-program pembangunan tanpa hambatan yang berarti.

Selain komunikasi internal antara eksekutif dan legislatif, komunikasi antara aktor politik dan masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) juga menjadi variabel penting dalam proses politik anggaran. Musrenbang adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam perencanaan anggaran. Komunikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan komunikasi berorientasi tugas, aktor politik dapat memastikan bahwa proses Musrenbang berjalan efektif, dengan hasil musyawarah yang diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran secara sistematis. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik anggaran.

6. Komunikasi Antar-Pribadi

Dalam komunikasi organisasi politik dan komunikasi berorientasi tugas, aktor-aktor politik, baik dari eksekutif maupun legislatif, sering kali menggunakan komunikasi antar-pribadi sebagai strategi untuk mencapai tujuan mereka. Komunikasi antar pribadi memungkinkan aktor politik untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan sesama aktor politik, termasuk anggota

fraksi, pemimpin organisasi, atau bahkan masyarakat dalam konteks Musrenbang. Melalui komunikasi antar-pribadi, aktor politik dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan, mendapatkan dukungan, dan mengatasi hambatan yang muncul dalam proses politik anggaran. Pendekatan ini sering digunakan untuk menjembatani perbedaan pandangan, membangun kepercayaan, dan menciptakan suasana kolaboratif yang lebih produktif.

Meskipun komunikasi antar-pribadi dapat membawa aktor politik ke wilayah yang lebih intim dan personal, batas-batas komunikasi tetap dijaga dengan ketat untuk menghormati struktur organisasi politik seperti fraksi dan peran aktor utama. Aktor politik yang berkomunikasi dengan cara ini harus tetap memperhatikan hierarki, kode etik, dan aturan main dalam politik, sehingga tidak melanggar batas-batas profesionalisme. Ini termasuk menghormati keputusan kolektif dan menjaga keseimbangan antara hubungan personal dan kepentingan organisasi. Komunikasi antar-pribadi dalam konteks ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang mendukung, tetapi tidak mengorbankan integritas organisasi politik atau mengganggu proses pengambilan keputusan yang lebih besar.

Dengan demikian, komunikasi antar pribadi berfungsi sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan para pemangku kepentingan politik tanpa mengorbankan tujuan utama dari komunikasi berorientasi tugas, yaitu mencapai kesepakatan yang efisien dan efektif dalam proses penganggaran. Aktor politik menggunakan komunikasi antar pribadi untuk membangun kedekatan dan mendapatkan dukungan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa proses politik anggaran berjalan dengan lancar, memperkuat hubungan antar-aktor, dan mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Penutup

1. Komunikasi Aktor politik anggaran dalam proses politik anggaran meliputi (1) komunikasi organisasi politik; (2) komunikasi berorientasi tugas; (3) komunikasi antar-pribadi.
2. Aktor politik anggaran utama dalam program kebijakan bidang infrastruktur secara konsep nilai utama adalah Gubernur Sumatera Utara. Sementara aspek teknis didukung oleh 3 (tiga) orang Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi D
DPRD Provinsi Sumatera Utara bidang pembangunan.

Ucapan Terimakasih

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi tata bahasa maupun sistematika penulisannya. Maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi perkembangan penelitian berikutnya dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Daftar Pustaka

- Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS.
- Chrestella Julitawati Hutaauruk. (2019). Bangunan Infrastruktur Sebagai Tolak Ukur Pemenuhan Hak Konstitusional di Wilayah Perbatasan. Prosiding Seminar Nasional Ke-3. www.setkab.go.id
- Ja'far, M. (2007). Infrastruktur Pro Rakyat: Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:106574907>
- John W. Creswell. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.).
- PEMROVSU. (2021). Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
- Setiawan, A. (2015). Politik Anggaran: Kebijakan Dana Bagi Hasil Migas Dalam Apbd Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. <https://doi.org/10.32493/EFN.V2I2.5178>